

Pengaruh Audit Internal dan Komite Audit Terhadap Efisiensi Investasi dengan Moderasi GCG pada Sektor Perbankan

Vinda Dwi Christina

Universitas Trisakti, Indonesia

Email: vindadwichristina@gmail.com

Keywords	Abstract
Job Safety Analysis; Safe Work Procedure; occupational risk; safety management; patrol vessel.	<i>This study aims to analyze occupational safety risks in deck maintenance activities on the KPLP KN.P. 353 patrol vessel and to develop risk control measures in the form of a Safe Work Procedure (SWP) based on Job Safety Analysis (JSA). A descriptive qualitative approach was applied through direct observation, interviews, and documentation to identify work stages, potential hazards, and risk levels using a 3×3 risk matrix. The results indicate that all deck maintenance activities involve occupational safety risks, with chipping identified as the highest risk activity (score 9) due to flying debris and non-compliance with PPE usage. Fiber sanding and painting activities are classified as high risk (score 6) due to abrasive dust and VOC exposure, while equipment inspection, brushing, and housekeeping fall under moderate risk (score 4). The findings also reveal that unsafe acts, particularly PPE violations, are the dominant contributing factor to workplace incidents. Risk control measures are structured based on the Hierarchy of Controls, including elimination, substitution, engineering control, administrative control, and PPE. The SWP implementation includes machine guarding, ventilation systems, work time limitations, worker rotation, and safety culture reinforcement through safety briefings and near-miss reporting systems. The study confirms that systematic JSA implementation effectively produces practical safety procedures capable of reducing occupational risks in maritime operations.</i>
Kata kunci	Abstrak
JSA; SWP; risiko kerja; keselamatan kerja; kapal patroli	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko keselamatan kerja pada kegiatan perawatan deck kapal patroli KPLP KN.P. 353 serta menyusun upaya pengendalian risiko dalam bentuk Safe Work Procedure (SWP) berbasis Job Safety Analysis (JSA). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tahapan pekerjaan, potensi bahaya, serta tingkat risiko menggunakan matriks risiko 3×3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perawatan deck memiliki potensi risiko keselamatan kerja, dengan aktivitas chipping sebagai risiko tertinggi (skor 9) akibat flying debris dan ketidakpatuhan penggunaan APD. Aktivitas amplas fiber dan pengecatan memiliki risiko tinggi (skor 6) yang disebabkan paparan debu abrasif dan uap VOC, sedangkan inspeksi alat, brushing, dan housekeeping berada pada risiko sedang (skor 4). Temuan juga menunjukkan bahwa unsafe act, khususnya pengabaian APD, merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan kerja. Upaya pengendalian risiko disusun berdasarkan Hierarchy of Controls yang mencakup eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD. Implementasi SWP mencakup pemasangan pelindung alat, ventilasi, pembatasan waktu kerja, rotasi pekerja, serta penguatan budaya keselamatan melalui safety briefing dan sistem pelaporan near miss. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan JSA secara sistematis mampu menghasilkan prosedur kerja aman yang

PENDAHULUAN

Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan kepada sektor produktif. Sektor perbankan juga mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan aktivitas investasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Peran tersebut menjadikan sektor perbankan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan perbankan perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara optimal agar perusahaan mampu mengelola investasi secara efisien, meningkatkan kinerja perusahaan, dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Abdelhak & Hussainey, 2025).

Di Indonesia, sektor perbankan memiliki peran yang semakin strategis seiring perkembangan pasar modal dan sistem keuangan nasional. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki kewajiban menjaga kepercayaan investor, menerapkan prinsip keterbukaan informasi, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan perusahaan publik menyampaikan informasi material secara terbuka kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan perlu menerapkan sistem pengawasan dan tata kelola yang efektif untuk menjaga stabilitas perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam praktik bisnis modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga dari kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Salah satu keputusan strategis yang menentukan keberlangsungan perusahaan adalah keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan penempatan dana perusahaan pada aset, proyek, pengembangan usaha, teknologi, maupun instrumen keuangan yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Pada sektor perbankan, aktivitas investasi dapat dilakukan melalui pengembangan layanan digital banking, penguatan sistem teknologi informasi, ekspansi jaringan kantor, peningkatan portofolio kredit, investasi surat berharga, serta pengembangan aset produktif lainnya.

Efisiensi investasi merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Perusahaan yang mampu melakukan investasi secara efisien cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, nilai perusahaan yang lebih tinggi, serta tingkat kepercayaan investor yang lebih kuat. Sebaliknya, keputusan investasi yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya perusahaan, meningkatkan biaya modal, serta menurunkan kualitas kinerja perusahaan. Literatur keuangan menjelaskan bahwa ketidakefisienan investasi umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu *overinvestment* dan *underinvestment*. *Overinvestment* terjadi ketika perusahaan mengalokasikan dana pada proyek yang memberikan manfaat ekonomi di bawah tingkat yang

diharapkan atau bahkan memiliki nilai bersih negatif. Sebaliknya, underinvestment terjadi ketika perusahaan gagal memanfaatkan peluang investasi yang berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Biddle, Hilary, & Verdi, 2009).

Meskipun total aset industri perbankan terus mengalami peningkatan, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan aset maupun ekspansi usaha semata. Perusahaan juga dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien sehingga investasi yang dilakukan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal. Hal tersebut tercermin dari indikator efisiensi dan profitabilitas industri perbankan, antara lain melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Return on Assets (ROA).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan aset dan peningkatan profitabilitas tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi operasional secara konsisten. Perusahaan perbankan menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan biaya operasional, kebutuhan investasi teknologi informasi, penguatan keamanan siber, serta pengembangan layanan digital yang memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk melakukan investasi dalam jumlah besar guna mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Urgensi efisiensi investasi pada sektor perbankan semakin meningkat seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan percepatan transformasi digital dalam industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan perbankan di Indonesia melakukan berbagai investasi strategis untuk mendukung digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keamanan siber, pengembangan aplikasi digital, serta modernisasi sistem operasional. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu fokus utama pengembangan industri perbankan guna meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Kondisi tersebut mendorong perusahaan perbankan untuk mengalokasikan sumber daya yang semakin besar pada berbagai proyek investasi strategis.

Namun demikian, peningkatan investasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan manfaat ekonomi yang sebanding. Perusahaan perbankan menghadapi berbagai tantangan berupa meningkatnya biaya pengembangan teknologi, kebutuhan investasi keamanan siber, perubahan perilaku nasabah, serta tekanan persaingan dari perusahaan teknologi finansial (fintech). Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya overinvestment apabila perusahaan mengalokasikan sumber daya pada proyek yang tidak memberikan manfaat sesuai ekspektasi. Di sisi lain, perusahaan juga berpotensi mengalami underinvestment apabila tidak mampu memanfaatkan peluang investasi yang sebenarnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan tidak hanya dituntut untuk melakukan investasi, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

Permasalahan efisiensi investasi memiliki hubungan yang erat dengan teori keagenan (agency theory). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Manajemen perusahaan memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham sehingga memunculkan asimetri informasi. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen

mengambil keputusan investasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Akibatnya, perusahaan berpotensi mengalami overinvestment maupun underinvestment yang berdampak pada menurunnya efisiensi investasi. Manajemen dapat melakukan ekspansi usaha secara berlebihan, mengejar target jangka pendek, atau mempertahankan posisi jabatan melalui keputusan investasi tertentu. Perusahaan perbankan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap keputusan investasi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Audit internal, komite audit, dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan perusahaan serta meningkatkan efisiensi investasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dokumen atau arsip yang telah tersedia, baik dalam bentuk laporan maupun publikasi resmi yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Metode ini dipilih karena penelitian menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah tersedia dalam bentuk laporan yang telah disusun oleh pihak lain (Sekaran dan Bougie, 2016). Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2025. Laporan tersebut memuat informasi yang dibutuhkan untuk mengukur variabel penelitian, seperti data terkait audit internal, komite audit, *Good Corporate Governance*, serta informasi keuangan perusahaan.

Data penelitian diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) yang menyediakan akses terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik. Selain itu, data juga diperoleh melalui situs resmi masing-masing perusahaan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang digunakan. Penggunaan sumber data resmi ini bertujuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2021).

Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Purposive sampling merupakan salah satu teknik non-probability sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu sehingga sampel yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pemilihan purposive sampling dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki karakteristik yang sesuai dengan variabel penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses seleksi agar perusahaan yang dijadikan sampel benar-benar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam

pengukuran variabel Audit Internal, Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Efisiensi Investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pengaruh Audit Internal terhadap Investment Efficiency

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Internal merupakan satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Audit Internal masih menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan investasi perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pelaksanaan Audit Internal, semakin besar kemampuannya dalam mendukung efisiensi investasi melalui proses pengawasan, evaluasi, serta pengendalian aktivitas operasional perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agency Theory yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya information asymmetry, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Audit Internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi kesenjangan informasi melalui proses evaluasi, pengendalian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

Melalui pelaksanaan fungsi assurance dan consulting, Audit Internal mampu meningkatkan kualitas proses bisnis, memperkuat efektivitas pengendalian internal, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, keputusan investasi perusahaan menjadi lebih rasional, lebih akuntabel, dan lebih sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors yang menempatkan Audit Internal sebagai fungsi independen yang memberikan nilai tambah (value added) melalui peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Dalam praktiknya, Audit Internal tidak hanya berperan menemukan penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pengambilan keputusan manajemen.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka COSO Internal Control Framework yang menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, penilaian risiko, serta aktivitas pemantauan sebagai komponen utama sistem pengendalian internal. Audit Internal memiliki keterkaitan erat dengan seluruh komponen tersebut sehingga semakin efektif pelaksanaan Audit Internal maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan menghasilkan keputusan investasi yang lebih efisien.

Hasil penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa efektivitas Audit Internal tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan kesalahan ataupun penyimpangan, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan perusahaan. Pada industri perbankan, keputusan investasi umumnya melibatkan tingkat risiko yang tinggi serta berada dalam lingkungan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan Audit Internal menjadi salah satu mekanisme yang mampu memastikan bahwa setiap keputusan investasi

telah melalui proses evaluasi, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun ketentuan regulator.

Dari perspektif praktik tata kelola perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan sebaiknya terus memperkuat fungsi Audit Internal melalui peningkatan kompetensi auditor internal, penguatan independensi organisasi Audit Internal, pemanfaatan teknologi audit berbasis digital, serta peningkatan koordinasi dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sehingga keputusan investasi yang diambil perusahaan menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai perusahaan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Audit Internal merupakan satu-satunya faktor yang menentukan Investment Efficiency. Sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2), masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi efisiensi investasi perusahaan. Oleh karena itu, Audit Internal perlu dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang bekerja bersama faktor-faktor organisasi lainnya untuk mendukung terciptanya keputusan investasi yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Audit Internal memiliki peranan yang nyata dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi pada perusahaan perbankan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas fungsi pengawasan internal merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Investment Efficiency. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung Agency Theory sekaligus memperkuat pandangan bahwa penguatan fungsi Audit Internal merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan efisiensi investasi.

Pembahasan Pengaruh Komite Audit terhadap Investment Efficiency

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik Komite Audit yang digunakan dalam penelitian belum mampu menjelaskan variasi tingkat efisiensi investasi perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan Komite Audit pada perusahaan sampel belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan maupun penurunan Investment Efficiency.

Secara teoritis, keberadaan Komite Audit merupakan salah satu mekanisme utama dalam penerapan Good Corporate Governance. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Dalam perspektif Agency Theory, Komite Audit diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen melalui peningkatan kualitas pengawasan serta transparansi informasi perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Investment Efficiency. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan Komite Audit belum secara langsung memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Salah satu kemungkinan penyebab kondisi tersebut adalah karakteristik tugas Komite Audit yang lebih banyak berfokus pada

aspek kepatuhan (compliance), kualitas pelaporan keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal dibandingkan pada proses pengambilan keputusan investasi yang bersifat operasional.

Dalam industri perbankan Indonesia, struktur, komposisi, independensi, serta keberadaan Komite Audit pada dasarnya telah diatur secara ketat melalui berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hampir seluruh bank yang menjadi perusahaan publik telah memenuhi persyaratan minimum mengenai jumlah anggota, independensi, kompetensi, serta pelaksanaan rapat Komite Audit. Kondisi tersebut menyebabkan karakteristik Komite Audit antarbank menjadi relatif seragam sehingga variasi yang dapat menjelaskan perbedaan tingkat Investment Efficiency menjadi semakin terbatas.

Selain itu, efektivitas Komite Audit tidak selalu dapat diukur hanya melalui indikator-indikator kuantitatif seperti jumlah anggota, frekuensi rapat, maupun proporsi anggota independen. Efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas diskusi, kompetensi anggota, independensi dalam mengambil keputusan, kemampuan memahami risiko bisnis, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Aspek-aspek tersebut sulit diukur menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan sehingga kemungkinan belum sepenuhnya tercermin dalam model penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik perusahaan perbankan, keputusan investasi lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan strategis Direksi, manajemen risiko, kondisi makroekonomi, strategi bisnis, serta kebijakan regulator dibandingkan oleh aktivitas rutin Komite Audit. Dengan demikian, walaupun Komite Audit memiliki peran penting dalam memastikan kualitas tata kelola perusahaan, pengaruhnya terhadap Investment Efficiency cenderung bersifat tidak langsung melalui peningkatan kualitas pengendalian internal dan pelaporan keuangan.

Temuan penelitian ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Komite Audit tidak penting bagi perusahaan. Sebaliknya, hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Komite Audit mungkin lebih tepat diukur melalui variabel lain, seperti kualitas pelaporan keuangan, pencegahan fraud, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, atau kualitas manajemen risiko. Oleh karena itu, tidak signifikannya hubungan antara Komite Audit dan Investment Efficiency dalam penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup variabel yang digunakan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa keberadaan Komite Audit tidak selalu berhubungan secara langsung dengan efisiensi investasi perusahaan, terutama pada sektor yang memiliki tingkat regulasi tinggi seperti industri perbankan. Dalam lingkungan yang telah memiliki standar tata kelola yang relatif seragam, variasi karakteristik Komite Audit menjadi kurang mampu menjelaskan perbedaan kinerja investasi antarperusahaan.

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan tidak cukup hanya membentuk Komite Audit sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasannya. Peningkatan kompetensi anggota Komite Audit, pemanfaatan informasi berbasis risiko, koordinasi yang lebih erat dengan Audit Internal, serta pengawasan terhadap implementasi rekomendasi audit merupakan beberapa langkah yang dapat meningkatkan nilai tambah Komite Audit terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit belum terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian. Temuan ini tidak mengurangi pentingnya keberadaan Komite Audit dalam sistem tata kelola perusahaan, tetapi menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap efisiensi investasi kemungkinan berlangsung secara tidak langsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola perusahaan dengan menunjukkan bahwa efektivitas Komite Audit tidak selalu tercermin dalam peningkatan Investment Efficiency, khususnya pada industri perbankan yang memiliki tingkat regulasi dan standar tata kelola yang tinggi.

Pembahasan Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Investment Efficiency

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2025. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerapan Good Corporate Governance yang diukur dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variasi Investment Efficiency pada perusahaan sampel. Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan efisiensi investasi.

Secara konseptual, Good Corporate Governance merupakan seperangkat mekanisme, struktur, dan proses yang dirancang untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam perspektif Agency Theory, penerapan Good Corporate Governance diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen melalui peningkatan kualitas pengawasan, transparansi informasi, serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, secara teoritis perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance yang lebih baik diharapkan memiliki kualitas keputusan investasi yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan Investment Efficiency.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak memperoleh dukungan empiris. Salah satu penjelasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa industri perbankan merupakan sektor dengan tingkat regulasi tata kelola yang sangat tinggi. Seluruh bank yang menjadi perusahaan publik diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk kewajiban pembentukan organ tata kelola, pelaksanaan fungsi pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, audit eksternal, serta penyampaian laporan penerapan Good Corporate Governance secara berkala.

Kondisi tersebut menyebabkan tingkat penerapan Good Corporate Governance antarperusahaan menjadi relatif homogen. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian telah memenuhi standar minimum tata kelola yang ditetapkan regulator sehingga variasi skor Good Corporate Governance antarbank menjadi relatif kecil. Ketika variasi suatu variabel terbatas, kemampuan variabel tersebut untuk menjelaskan perbedaan pada variabel lain juga cenderung menurun. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa Good Corporate Governance tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Investment Efficiency dalam penelitian ini.

Selain itu, perlu dipahami bahwa Good Corporate Governance lebih bersifat sebagai kerangka tata kelola (governance framework) dibandingkan sebagai mekanisme operasional

yang secara langsung memengaruhi keputusan investasi. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memang menciptakan lingkungan organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, namun keputusan investasi perusahaan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti strategi bisnis, kondisi makroekonomi, kualitas manajemen risiko, arah kebijakan manajemen, kondisi pasar, serta peluang investasi yang tersedia. Dengan demikian, keberadaan Good Corporate Governance lebih berfungsi sebagai fondasi pengelolaan perusahaan daripada sebagai faktor yang secara langsung menentukan efisiensi investasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tata kelola belum tentu identik dengan efektivitas pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dapat memiliki struktur tata kelola yang baik dan memenuhi seluruh ketentuan regulator, namun tetap menghadapi tantangan dalam menentukan investasi yang optimal akibat perubahan kondisi ekonomi, persaingan industri, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan Investment Efficiency tidak hanya bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan merespons dinamika lingkungan bisnis.

Dari perspektif metodologis, hasil penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pengukuran variabel Good Corporate Governance yang menggunakan data sekunder. Pengukuran berbasis laporan tahunan umumnya menggambarkan struktur dan kepatuhan tata kelola, namun belum sepenuhnya mampu menangkap kualitas implementasi tata kelola dalam praktik sehari-hari. Aspek-aspek seperti budaya organisasi, kualitas diskusi pada tingkat Dewan Komisaris, efektivitas pengawasan strategis, maupun kualitas pengambilan keputusan manajemen merupakan faktor yang sulit diukur hanya melalui informasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak berarti bahwa Good Corporate Governance tidak penting bagi perusahaan. Sebaliknya, temuan ini menunjukkan bahwa peran Good Corporate Governance kemungkinan lebih bersifat tidak langsung, misalnya melalui peningkatan kualitas pengendalian internal, efektivitas manajemen risiko, kualitas pelaporan keuangan, atau peningkatan kepercayaan investor. Dengan demikian, manfaat Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan dapat muncul melalui berbagai mekanisme lain yang tidak secara langsung tercermin dalam ukuran Investment Efficiency yang digunakan dalam penelitian ini.

Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur tata kelola perusahaan, khususnya pada sektor perbankan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam industri yang memiliki tingkat regulasi tinggi dan standar tata kelola yang relatif seragam, Good Corporate Governance tidak selalu menjadi faktor pembeda dalam menjelaskan efisiensi investasi antarperusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan indikator tata kelola yang lebih berorientasi pada efektivitas implementasi, bukan hanya pada struktur dan kepatuhan formal, sehingga hubungan antara Good Corporate Governance dan Investment Efficiency dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance belum terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan prasyarat penting bagi pengelolaan

perusahaan, namun belum tentu menjadi faktor yang secara langsung menentukan tingkat efisiensi investasi. Dengan demikian, Good Corporate Governance tetap memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan perusahaan, meskipun pengaruh langsungnya terhadap Investment Efficiency tidak terbukti secara empiris dalam penelitian ini.

Pembahasan Peran Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung Good Corporate Governance (GCG) terhadap Investment Efficiency, tetapi juga menganalisis perannya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Audit Internal dan Investment Efficiency serta antara Komite Audit dan Investment Efficiency. Secara teoritis, keberadaan variabel moderasi diharapkan mampu mengubah arah maupun kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, Good Corporate Governance diasumsikan dapat memperkuat efektivitas mekanisme pengawasan perusahaan sehingga pengaruh Audit Internal maupun Komite Audit terhadap Investment Efficiency menjadi lebih optimal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak terbukti memoderasi hubungan antara Audit Internal dan Investment Efficiency maupun hubungan antara Komite Audit dan Investment Efficiency. Dengan demikian, tingkat penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian belum mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan kedua mekanisme pengawasan tersebut terhadap Investment Efficiency.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa Good Corporate Governance lebih berfungsi sebagai sistem tata kelola yang berdiri sendiri dibandingkan sebagai faktor yang mengubah efektivitas mekanisme pengawasan internal. Dalam praktik tata kelola perusahaan, Audit Internal, Komite Audit, serta Good Corporate Governance memang merupakan bagian dari sistem pengawasan perusahaan, namun masing-masing memiliki fungsi, tanggung jawab, dan ruang lingkup yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas Audit Internal maupun Komite Audit tidak selalu bergantung pada tingkat penerapan Good Corporate Governance sebagaimana diukur dalam penelitian ini.

Dari perspektif Agency Theory, Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen melalui pembentukan struktur pengawasan yang efektif. Akan tetapi, teori tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Good Corporate Governance harus selalu memperkuat hubungan antara mekanisme pengawasan internal dengan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan tata kelola perusahaan yang baik lebih berfungsi sebagai prasyarat terciptanya sistem pengendalian yang sehat, bukan sebagai faktor yang secara otomatis meningkatkan efektivitas setiap mekanisme pengawasan yang ada di dalam organisasi.

Salah satu penjelasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tingkat penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan perbankan relatif homogen. Sebagai industri yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, seluruh bank wajib memenuhi berbagai ketentuan mengenai tata kelola perusahaan, termasuk pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta pelaksanaan evaluasi tata kelola secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian telah memiliki standar tata kelola yang relatif serupa sehingga variasi Good Corporate Governance antarperusahaan menjadi terbatas. Ketika variasi suatu variabel relatif

kecil, kemampuan variabel tersebut untuk berfungsi sebagai variabel moderasi juga menjadi semakin terbatas.

Selain itu, hubungan antara Audit Internal maupun Komite Audit dengan Investment Efficiency kemungkinan lebih dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan dibandingkan oleh tingkat penerapan Good Corporate Governance secara umum. Sebagai contoh, independensi auditor internal, kompetensi anggota Komite Audit, kualitas rekomendasi audit, budaya pengendalian, serta komitmen manajemen terhadap implementasi rekomendasi audit merupakan faktor-faktor yang secara praktis dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap efektivitas pengawasan dibandingkan keberadaan struktur tata kelola secara formal.

Temuan penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa hubungan antar mekanisme tata kelola perusahaan tidak selalu bersifat saling memperkuat. Dalam praktik perusahaan, Audit Internal, Komite Audit, dan Good Corporate Governance dapat berjalan secara paralel dengan fungsi masing-masing tanpa menghasilkan efek interaksi yang signifikan terhadap Investment Efficiency. Dengan demikian, keberhasilan suatu mekanisme pengawasan lebih banyak ditentukan oleh efektivitas pelaksanaannya dibandingkan oleh keberadaan mekanisme tata kelola lainnya.

Dari perspektif metodologis, tidak signifikannya efek moderasi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pengukuran Good Corporate Governance yang menggunakan data sekunder berbasis laporan tahunan. Pengukuran tersebut lebih mencerminkan aspek kepatuhan terhadap struktur tata kelola dibandingkan kualitas implementasi tata kelola dalam aktivitas operasional perusahaan. Akibatnya, kemampuan variabel tersebut dalam menangkap efek interaksi dengan Audit Internal maupun Komite Audit menjadi relatif terbatas.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola perusahaan, khususnya pada sektor perbankan Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan Good Corporate Governance sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini juga menguji perannya sebagai variabel moderasi. Meskipun hasil pengujian menunjukkan bahwa efek moderasi tidak signifikan, temuan tersebut tetap memiliki nilai akademik karena menunjukkan bahwa peran moderasi Good Corporate Governance tidak selalu muncul pada setiap konteks penelitian, terutama pada industri yang telah memiliki standar tata kelola yang tinggi dan relatif seragam.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance, tetapi juga perlu meningkatkan efektivitas implementasi setiap mekanisme pengawasan secara nyata. Penguatan kompetensi auditor internal, peningkatan kualitas Komite Audit, optimalisasi fungsi manajemen risiko, serta komitmen manajemen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan Investment Efficiency dibandingkan hanya berfokus pada pemenuhan aspek formal tata kelola perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance belum terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Audit Internal maupun Komite Audit terhadap Investment Efficiency pada perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan internal lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan masing-masing fungsi pengawasan dibandingkan oleh interaksi dengan tingkat penerapan Good Corporate

Governance. Oleh karena itu, perusahaan perlu memandang Good Corporate Governance sebagai fondasi tata kelola perusahaan yang harus diimplementasikan secara substantif, bukan hanya sebagai pemenuhan ketentuan formal, sehingga seluruh mekanisme pengawasan dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Audit Internal dan Komite Audit terhadap Efisiensi Investasi dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Audit Internal berpengaruh terhadap Efisiensi Investasi pada perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah pertama yang menanyakan apakah Audit Internal berpengaruh terhadap Efisiensi Investasi dapat dijawab bahwa semakin efektif pelaksanaan fungsi Audit Internal, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menciptakan efisiensi investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Audit Internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, mendukung pengelolaan risiko, serta membantu manajemen dalam menghasilkan keputusan investasi yang lebih efektif dan bernilai tambah.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Investasi. Dengan demikian, rumusan masalah kedua dijawab bahwa keberadaan Komite Audit pada perusahaan perbankan belum terbukti memberikan pengaruh langsung terhadap Efisiensi Investasi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas Komite Audit kemungkinan lebih tercermin pada fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, kepatuhan, dan pengendalian internal dibandingkan pada peningkatan efisiensi investasi secara langsung.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Investasi. Oleh karena itu, rumusan masalah ketiga dijawab bahwa penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan perbankan belum secara langsung memengaruhi tingkat Efisiensi Investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi penting bagi pengelolaan perusahaan, namun belum tentu menjadi faktor yang secara langsung menentukan efisiensi investasi. Dalam industri perbankan yang memiliki standar tata kelola yang relatif seragam, Good Corporate Governance lebih berperan sebagai kerangka tata kelola perusahaan daripada sebagai faktor pembeda dalam menciptakan Efisiensi Investasi.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh Audit Internal terhadap Efisiensi Investasi. Dengan demikian, rumusan masalah keempat dijawab bahwa tingkat penerapan Good Corporate Governance belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Audit Internal dan Efisiensi Investasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Audit Internal lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan fungsi audit itu sendiri daripada dipengaruhi oleh tingkat penerapan Good Corporate Governance.

Kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Efisiensi Investasi. Dengan demikian, rumusan masalah kelima dijawab bahwa hubungan antara Komite Audit dan Efisiensi Investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat penerapan Good Corporate Governance. Temuan ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance belum berfungsi sebagai variabel yang mampu meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam mendorong Efisiensi Investasi pada perusahaan perbankan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Audit Internal merupakan mekanisme tata kelola yang memiliki kontribusi nyata terhadap Efisiensi Investasi, sedangkan Komite Audit dan Good Corporate Governance belum menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan, baik sebagai variabel independen maupun sebagai variabel moderasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Efisiensi Investasi pada perusahaan perbankan lebih dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal dibandingkan oleh keberadaan mekanisme tata kelola yang bersifat struktural. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperkuat kualitas Audit Internal melalui peningkatan kompetensi auditor, independensi fungsi audit, penerapan audit berbasis risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi dan menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhak, E. E., & Hussainey, K. (2025). The impact of Audit Quality and corporate governance on financial segment disclosure in Egypt. *International Journal of Financial Studies*, 13(2), 57.
- Abraham, Rebecca, Venkata Mrudula Bhimavarapu, dan Hani El-Chaarani. (2025). "The Impact of Audit Committee Oversight on Investor Rationality." *Journal of Risk and Financial Management*.
- Abudu, Dawuda, dan Syed Ahmed Salman. (2025). "Corporate Governance and Shareholders' Value." *Journal of Risk and Financial Management*.
- Ambrosius, Niko Ferdianto, Ayu Puspita Sari, dan Rusliyawati. (2025). "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Intervening." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*.
- Anderson, Ronald C., Sattar A. Mansi, dan David M. Reeb. "Founding Family Ownership and the Agency Cost of Debt." *Journal of Financial Economics*.
- Belouadah, Fateh. (2026). "The Role of Audit Committee Characteristics in Enhancing ESG Accounting Disclosures." *Journal of Risk and Financial Management*.
- Biddle, Gary C., Gilles Hilary, dan Rodrigo S. Verdi. (2009). "How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?" *Journal of Accounting and Economics*.
- DeFond, Mark L., dan Jieying Zhang. "A Review of Archival Auditing Research." *Journal of Accounting and Economics*.
- Dewi, Meylisa Kusuma, Sri Wahyuni, Eko Hariyanto, dan Dwi Winarni. (2025). "The Effect of Audit Quality, Financial Stability, and Audit Committee on Financial Statement Fraud." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*.
- Eisenhardt, Kathleen M. (1989). "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Review*.

- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.
- Ghozali, Imam. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS*.
- Gujarati, Damodar N., dan Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometrics*.
- Hair, Joseph F., et al. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Hariadi, Sugeng. (2023). "Efek Moderasi Firm Size terhadap Kualitas Laba." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*.
- International Finance Corporation. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual*. Jakarta: IFC & OJK, 2014.
- International Finance Corporation. (2018). *Indonesia Corporate Governance Manual*. Jakarta: IFC, 2018.
- Kashani, Samira M., dan Mahmoud Mousavi Shiri. (2022). "The Role of Corporate Governance in Investment Efficiency." *Journal of Risk and Financial Management*.
- Khattak, Asiya, et al. (2025). "Impact of Board Composition on Investment Efficiency." *Critical Review of Social Sciences Studies*.
- Klein, April. "Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management."
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Mufidah, Nuril, dan Tuban Drijah Herawati. (2025). "The Effect of Good Corporate Governance on Earnings Management." *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi*.
- Nguyen, Quang Minh, dan Chien V. Nguyen. (2024). "Corporate Governance, Audit Quality and Firm Performance." *Cogent Economics & Finance*.
- Oktaviani, dan Dewita Puspawati. (2026). "Pengaruh GCG dan CSR terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Mediasi." *Jurnal Lentera Bisnis*.
- Olteanu Burcă, Andreea Larisa, et al. (2024). "Role of Audit Committees and Internal Audit in ESG."
- Pangaribuan, Hisar. (2025). *Audit Committee*.
- Patmawati, Mia, dan Suyatmin Waskito Adi. (2026). "Pengaruh GCG, CSR, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan." *Indonesian Journal of Digital Business*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024.
- Pramono, Susan Febrina, dan Wiwi Idawati. 2026. "The Effect of Good Corporate Governance on Audit Quality." *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*.
- Richardson, Scott. 2006. "Over-Investment of Free Cash Flow." *Review of Accounting Studies*.
- Salehi, Mahdi, et al. 2022. "The Impact of Investment Efficiency on Firm Value." *Journal of Risk and Financial Management*.
- Saleh, M. Hasbi. 2020. *Corporate Governance*.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business*.

Spence, Michael. 1973. "Job Market Signaling."

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif.

Sudarmanto, Eko, dkk. 2021. Good Corporate Governance .

Sunatar, Bambang, Amanda Laviuna, dkk. 2025. "Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan GCG sebagai Moderasi." JEMMA.

Saputro, Endika Nugroho, dan Jaeni. 2025. "Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan." COSTING.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Wehrhahn, Christoph, dan Patrick Velte. 2024. "Audit Committees and Internal Control Systems."